

OMBUDSMAN BALI HERAN MASIH ADA YANG KENA TIPU TES CPNS

Rabu, 03 April 2019 - Dewa Made Krisna Adhi

DENPASAR, kanalbali.com - Kasus penipuan yang dialami 48 orang yang mengaku telah lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membuat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali sangat heran. Sebab, sistem saat ini sudah sangat transparan dan peserta bisa langsung mengecek sendiri hasilnya.

"Jadi ini berarti publik belum mengetahui sepenuhnya proses itu," kata Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab saat dikonfirmasi, Rabu (3/4).

Transparansi proses itu terlihat dimana pemerintah sudah mengadopsi ujian yang berbasis komputer. Dengan cara ini, hasil ujiannya langsung dapat dilihat meskipun hasil seleksi belum diumumkan secara resmi.

Pihaknya meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali, segera mengambil langkah dengan melakukan investigasi terhadap peristiwa ini guna menemukan kebenarannya. Hal itu untuk mendapatkan kepastian sekaligus menepis adanya dugaan masih terjadinya proses penerimaan dengan cara membayar sejumlah uang.

Selain itu, Umar juga menyarankan, jika dari pihak BKD merasa dirugikan akibat peristiwa ini. Ombudsman meminta agar BKD segera melaporkan kepada pihak kepolisian guna menemukan para pelakunya. "Jika tidak dilaporkan, dikhawatirkan akan merusak nama baik pemerintah saat ini," ujarnya.

Umar juga mengungkapkan, untuk laporan secara langsung terkait kasus tersebut dari pihak Ombudsman belum menerimanya. Tetapi, sudah mendapatkan informasi terkait hal tersebut beberapa hari yang lalu. Dia berharap, korban bisa membawa bukti penipuan ini ke pihak kepolisian, jangan malu melapor," ujar Umar.

Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku sempat bertanya kepada para korban berapa kerugian yang dialami mereka. Namun tidak ada yang mau mengakui. "Pada waktu itu, ditanya dan jelas dia tidak ngaku dan memang juga takut. Tapi biarlah ini urusan kepolisian. Nanti setelah kita laporkan biar beliau yang mengembangkan," ujarnya.

Lihadnyana juga mengatakan, bahwa kasus tersebut akan dilaporkan dalam dua hari ini ke pihak kepolisian. Karena pihaknya, masih mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibawa oleh 48 orang tersebut.

"Paling lambat 2 hari lagi. Karena kita harus mengumpulkan dokumen. Pertama adalah surat pengantar mereka ke sini. Name tag dan ketiga dia mengisi absensi dan nomor telepon," ujarnya.

Jika ada orang di dalam BKD yang ikut bermain ia berjanji akan menindak dengan tegas. "Mereka yakin sudah diterima. Saya langsung (Tindak tegas), jika pejabat (sudah) kena Tipikor. Kalau sudah dipenjara sudah pasti di pecat," tegasnya. (kanalbali/KAD)